

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KAMPUNG TEMATIK DI KAMPUNG BATIK KOTA SEMARANG

Oleh:

Mazidatur Rohmaniyah

Dr. Nunik Retno Herawati, M.Si

Drs. Turtiantoro, M.Si

Departemen Politik dan Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Diponegoro (Undip) Semarang

Email: mazidaturrohmaniyah@students.undip.ac.id

ABSTRAK

Urbanisasi memberikan dampak yang begitu kompleks pada kehidupan perkotaan, diatarannya yaitu kemiskinan dan permukiman kumuh. Kedua masalah tersebut adalah hal yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk diatasi. Kota Semarang memiliki kebijakan kampung tematik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam pembangunan kampung tematik diperlukan partisipasi masyarakat yang tinggi agar program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan, sayangnya karakteristik masyarakat perkotaan yang individualis, kurang akrab satu sama lain, dan heterogen membuat partisipasi masyarakat di daerah perkotaan sulit untuk dilakukan. Peneliti ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Hasil yang diperoleh partisipasi masyarakat dalam program kampung tematik di Kampung Batik belumlah optimal karena masih didominasi oleh Pemerintah Kota Semarang dan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam pembangunannya. Akibatnya, kondisi yang terjadi justru masyarakat menjadi terganggu kerukunan antar warganya.

ABSTRACT

Urbanization has a very complex impact on urban life, including poverty and slum settlements. Both of these problems are things that are the responsibility of the government to address. The city of Semarang has a thematic village policy to overcome these problems. In the development of thematic villages, high community participation is required so that the program can run in a sustainable manner, unfortunately the characteristics of urban communities that are individualistic, less familiar with each other, and heterogeneous make community participation in

urban areas difficult to carry out. This research uses a qualitative method with a case study type. The results obtained by community participation in the thematic village program in Batik Village have not been optimal because they are still dominated by the Semarang City Government and have not fully involved the community in its development. As a result, the conditions that occur actually disrupt the harmony of society among its citizens.

Keywords: thematic villages, community participation

PENDAHULUAN

Jika mendengar kata kampung, sering yang terlintas dalam pikiran adalah gambaran mengenai kondisi wilayah terpencil yang berada di pinggiran perkotaan. Menunjukkan suatu wilayah sendiri yang dihuni oleh masyarakat miskin perkotaan dengan kondisi rumah-rumah kumuh, saling berdempetan, bahkan tidak layak huni yang berada di balik megahnya gedung-gedung kota. Konon tempat ini sering dikaitkan sebagai sarang kriminalitas terjadi. Membahas kampung rasanya tidak adil jika kita hanya sekedar memberikan penilaian buruk terhadapnya tanpa mempelajari penyebab permasalahan ini terjadi. Terlebih lagi, kondisi permasalahan yang terjadi di kampung merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah untuk mengatasinya. Sayangnya, tanpa memahami betul persoalan kampung tentu kebijakan yang dihasilkan tidak akan menyelesaikan akar persoalannya.

Secara definisi, kampung diartikan sebagai “sebutan terhadap kesatuan sosial

yang berada di suatu tempat di dalam desa atau kelurahan, tapi di atas RT (Rukun Tetangga)” (Cahyono, 2018). Kampung yang berada pada wilayah *urban* memiliki beragam permasalahan yang dialami mulai dari persoalan lingkungan alam seperti kekeringan atau banjir, masalah sosial seperti tingkat kriminalitas dan radikalisme, terbengkalainya anak-anak buruh migran, buruknya tata laksana pemerintahan desa, kemiskinan, hingga ancaman kehilangan lahan (Budianta & Hapsarani, 2018, p. 2).

Oleh karenanya kampung sering dianggap sebagai wilayah kumuh, kurang sehat, dan menjadi ancaman penularan penyakit (Budianta & Hapsarani, 2018). Sejak kemunculan kota, kemiskinan sudah menjadi fenomena sosial yang cukup memprihatinkan. Di Indonesia sendiri, kemiskinan perkotaan sudah menjadi gejala nasional yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam penanganannya. Dalam hal ini, kemiskinan merupakan sesuatu yang abadi, berkelanjutan, serta tidak dapat diubah

melalui tindakan atau reformasi (Lasaiba, 2022).

Sayangnya, persoalan ini kemudian berimbas pada wilayah miskin di perkotaan yang dipandang negatif karena dianggap sebagai masalah dan penyakit kota, dalam hal ini yakni kampung. Persoalan yang dialami

Permasalahan globalisasi di era saat ini membuat daerah-daerah perkotaan semakin meningkatkan peranannya (Nasution, 1995). Selain mempercepat lalu lintas, globalisasi juga memberikan berbagai masalah yang kompleks (Budianta & Hapsarani, 2018), salah satunya yakni urbanisasi. Urbanisasi membuat pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan menjadi meningkat. Dampak yang kemudian timbul yakni semakin tingginya tingkat kepadatan penduduk yang tidak sebanding dengan keberadaan lahan pemukiman yang terbatas sehingga menyebabkan adanya pemukiman kumuh (Akbar, 2018).

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Indonesia membuat kebijakan bernama kampung tematik. Awal mula menjamurnya kampung tematik terjadi pada tahun 2013, yakni pada pemerintahan Gubernur Jakarta, Joko Widodo yang merencanakan pembangunan 100 kampung tematik dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2013.

kampung ini secara garis besar tidak dapat kita lepaskan dari permasalahan perkotaan. Pendapat tersebut sebetulnya dikritik oleh beberapa pegiat yang menyebutkan bahwa kampung bukanlah sebuah penyakit bagi perkotaan (Budianta & Hapsarani, 2018).

Sayangnya, program tersebut tidak berhasil dilakukan karena gagasan yang dicanangkan masih bersifat instan dan dilakukan secara sepihak sehingga mendapat banyak penolakan dari warga (Kuwado, 2013). Penolakan ini merupakan bukti dari pembangunan kampung tematik yang tidak mengedepankan partisipasi dari masyarakat.

Kota Semarang juga merupakan salah satu kota yang menerapkan kebijakan kampung tematik. Sepanjang tahun 2016 Kota Semarang telah berhasil membangun sebanyak 32 kampung tematik. Pada tahun 2017 kampung tematik di Kota Semarang bertambah hingga 80. Pada tahun 2018 direncanakan kampung tematik di Kota Semarang mencapai 177 sesuai dengan jumlah kelurahan di Kota Semarang, artinya setiap kelurahan di Kota Semarang direncanakan agar memiliki satu kampung tematik (Tamara dan Rahdriawan, 2016).

Hingga tahun 2022 tercatat sebanyak 260 kampung tematik di Kota Semarang (Fajlin, 2022) dan rencananya akan ditambah lagi 10

kampung tematik di tahun 2023 (Babel, 2022). Program ini dikritik oleh DPRD Kota Semarang dimana Pemerintah Kota Semarang tak perlu terlalu memaksakan agar masing-masing kelurahan memiliki kampung tematik (Wibisono, 2019).

Kampung Batik merupakan salah satu contoh kampung tematik yang berada di Kota Semarang. Kampung Batik dijadikan sebagai kampung tematik lantaran merupakan salah satu kawasan cagar budaya yang memiliki nilai sejarah di Kota Semarang. Kampung Batik sendiri sudah berdiri sejak zaman pemerintahan Belanda (Syarifa & Wijaya, 2019). Tulisan ini akan mengambil Kampung Batik Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang sebagai studi kasusnya. Dalam hal ini, tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk melihat bagaimana proses partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kampung Batik sebagai kampung tematik.

TINJAUAN TEORI

1. Kampung Tematik

Penelitian ini merujuk pada teori yang ditulis oleh Gabriela Czapiewska yang berjudul "*Wioski tematyczne w procesie odnowy wsi pomorskich*" atau yang berarti "Desa tema dalam proses pembaharuan desa Pomeranian". Secara definisi, kampung tematik dapat diartikan

sebagai kampung yang pembangunannya ditundukkan pada ide dan tema (Idziak, 2008).

Atau lebih jelasnya, kampung tematik merupakan kampung yang dikembangkan berdasarkan ide yang unik dan memiliki suatu tema tertentu yang diputuskan oleh penduduknya sendiri dengan tujuan agar kampung tersebut dapat dikenal secara luas oleh masyarakat lain di luar kampung tersebut (Klockzo-Gajewska, 2014: 54).

Tema yang diambil sebagai identitas kampung tematik pun beragam, mulai dari sejarah, makanan lokal, kerajinan, lingkungan, budaya, dll. Tema yang diambil sebagai identitas dari kampung tematik ini berfungsi untuk memperluas wawasan, menginspirasi masyarakat akan ide-ide baru, membuat masyarakat berfikir untuk membuat kegiatan yang bisa dilakukan di kampung untuk meningkatkan kebersamaan, serta hal-hal yang menarik dan kreatif lainnya (Idziak, 2008).

Pembangunan kampung tematik ditujukan untuk mengembangkan dan melibatkan penduduk asli yang mengetahui sendiri kekuatan dan kelemahan kampung, ide pengembangan, yang didasarkan pada pengetahuan dan

diarahkan pada ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan (Kloczko-Gajewska, 2015). Pembangunan dan pengembangan kampung tematik juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya sekaligus menyesuaikan kampung dengan perubahan kondisi kehidupan dan ekonomi, khususnya pada posisi pertumbuhan sumber daya manusia, sosial, dan budaya (Idziak, 2004).

Proses penataan dan fungsi kampung juga bergantung pada penduduknya, mulai dari ide, konsistensi dalam bertindak, serta keterlibatan yang terus menerus. Keterlibatan ini menyangkut berbagai macam tindakan, mulai dari penawaran kepada pihak luar yang lebih luas hingga kegiatan yang ditujukan langsung untuk kepentingan masyarakat setempat. Dalam hal ini, masyarakat merupakan konstruksi terpenting dalam pembangunan kampung tematik. Potensi-potensi yang tidak terbatas mulai dari ide, kreatifitas, serta tindakan yang dilakukan untuk membangun kampung tematik terletak pada masyarakatnya (Czapiewska, 2012).

Pembuatan kampung tematik biasanya didasari atas inisiasi dari masyarakat yakni dari bawah ke atas, atau

atas dasar inisiatif pihak lain yang kemudian mendukung pembentukan serta pengembangan lebih lanjut (Czapiewska, 2012). Namun, meskipun kampung tematik seringkali merupakan inisiatif dari warga namun sebagian besar didukung oleh pihak dari luar melalui penawaran pelatihan dan lokakarya, kunjungan studi di kampung lain, dll (Kloczko-Gajewska, 2014: 55).

Czapiewska (2012:155) menyebutkan bahwa kampung tematik adalah cara untuk melakukan bisnis, integrasi penduduk, dan di saat yang bersamaan merupakan cara untuk menghidupkan kembali ekonomi bagi masyarakat di kampung tersebut. Oleh karenanya, kampung tematik ini semacam kombinasi antara kegiatan kewirausahaan dan kemasyarakatan yang menggabungkan inovasi di bidang ekonomi dan sosial (Czapiewska, 2012). Beberapa contoh implementasi dari pelaksanaan kampung tematik dari segi ekonomi yakni pendapatan yang dihasilkan dari wisatawan, dari bidang sosial yaitu kerjasama masyarakat yang lebih baik yang didasari pada tujuan bersama yang penting, serta dari bidang organisasi yakni kekuatan organisasi yang berkontribusi atas keberhasilan

kampung tematik (Kjoczko-Gajewska, 2015).

2. Partisipasi Masyarakat

Penelitian ini akan menggunakan pandangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dari John Cohen dan Norman Uphoff (1980) dalam tulisannya yang berjudul *Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity* sebagai pisau analisisnya. Berikut ringkasannya:

Cohen dan Uphoff (1980: 8) menjelaskan bahwa partisipasi bukanlah sesuatu yang ada atau tidak ada dan bukanlah suatu hal yang dapat diukur dengan cara yang sama seperti kapasitas bendungan atau jumlah produksi pertanian.

Berbeda dengan beberapa studi yang memperlakukan partisipasi sebagai sesuatu yang dapat diukur dengan jelas, Cohen dan Uphoff (1980:8) lebih memilih untuk memperlakukan partisipasi seperti rubrik dimana sejumlah elemen dapat didefinisikan dengan jelas dan dapat dikumpulkan. Dalam hal ini partisipasi adalah suatu konsep yang menyeluruh dengan menggunakan pendekatan yang paling baik serta melihat komponen spesifik lebih konkret.

Secara singkat dimensi partisipasi menyangkut jenis partisipasi yang terjadi, sekumpulan individu yang terlibat dalam proses partisipasi, serta berbagai ciri bagaimana proses itu terjadi. Karakteristik sejarah, lingkungan, dan sosial yang ada dalam masyarakat seringkali memiliki efek yang kuat pada pola partisipasi yang muncul dalam pembangunan masyarakat pada daerah tertentu.

Berbicara mengenai definisi, bermula pada pertanyaan mengenai 'apa itu partisipasi?' Cohen dan Uphoff (1980: 1) menjawab bahwa hal tersebut merupakan pertanyaan yang dapat dikatakan salah. Pertanyaan tersebut menyiratkan bahwa partisipasi merupakan sebuah fenomena tunggal. Oleh karenanya, partisipasi harus lebih berfokus pada kegiatan dan hasil yang spesifik tetapi beragam dan dapat dipahami secara bermakna dan didukung.

Lebih jelasnya, Cohen dan Uphoff (1980) menggambarkan partisipasi pembangunan dalam kerangka tiga dimensi partisipasi yang terdiri dari: 1) partisipasi seperti apa yang sedang dipertimbangkan; 2) siapa yang

berpartisipasi di dalamnya; 3) bagaimana partisipasi ini terjadi. Selanjutnya hal yang perlu dipertimbangkan lagi adalah dimana partisipasi itu terjadi, atau untuk apa partisipasi itu dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai bentuk partisipasi masyarakat dalam program kampung tematik di Kampung Batik Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang. Untuk itu diperlukan data-data empiris dan berbagai informasi yang relevan mengenai partisipasi masyarakat dalam program kampung tematik di Kampung Batik untuk mengursikan, menggambarkan, menganalisa, dan menginterpretasikan hasil dari penelitian tentang kondisi sebenarnya mengenai partisipasi masyarakat.

Jenis penelitian yang cocok dilakukan sesuai rumusan masalah pada penelitian ini yakni jenis penelitian studi kasus (case study). . Jenis metode penelitian studi kasus juga relevan dengan pertanyaan yang diajukan dari rumusan masalah ini yakni bagaimana partisipasi masyarakat pada program kampung tematik yakni di Kampung Batik Semarang. Subjek dari penelitian ini

dapat berupa individu, kelompok, ataupun masyarakat.

HASIL PENELITIAN

1. Pembangunan Kampung Tematik di Kampung Batik

Kampung tematik di Kota Semarang merupakan kebijakan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Semarang. Kebijakan ini diatur dalam rangka mencapai penurunan kemiskinan yang disesuaikan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021; mendukung bidang ekonomi, edukasi, ekosistem, dan etos bersama masyarakat; serta mengangkat potensi unggulan lokal masyarakat yang tersebar di 177 kelurahan Kota Semarang (Pemerintah Kota Semarang, 2016).

Kampung Batik sendiri merupakan salah satu kampung yang pertama kali ditetapkan sebagai kampung tematik bersama dengan 32 kampung lainnya yang tersebar pada 16 kelurahan di Kota Semarang. Penetapan kampung tematik ini diatur melalui Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/799 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi dan Tema Kampung Tematik Kota Semarang Tahun 2016.

Tujuan dari pembangunan kampung tematik di Kota Semarang berkaitan dengan tiga hal yakni; 1) meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui potensi masyarakat yang ada, 2) meningkatkan sarana dan prasarana yang meningkatkan kualitas pemukiman penduduk; dan 3) meningkatkan kearifan lokal masyarakat. Sedangkan dalam web kampung tematik Kota Semarang dijelaskan tujuan kampung tematik ialah sebagai bentuk inovasi dalam bidang pariwisata namun juga sekaligus solusi dari permasalahan pemukiman perkotaan. (Semarangkota.go.id, diakses pada tahun 2022).

Dari ketiga tujuan tersebut dapat kita gambarkan bahwa tujuan pertama dari pembangunan kampung tematik di Kota Semarang adalah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, tujuan kedua adalah untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh, dan tujuan ketiga adalah membangun tujuan pertama dan kedua berdasarkan potensi yang dimiliki masyarakat.

Dalam pengajuan Kampung Batik menjadi kampung tematik yang diserahkan kepada pihak Bappeda, ada tiga hal yang diajukan untuk dibangun di Kampung Batik yakni secara fisik yaitu pembangunan gapura, potisasi tanaman, tanaman vertikal untuk penghijauan, pengecatan kanstin jalan dan lukisan di paving, lampu penerangan jalan, dan tong sampah.

Kedua dari segi sosial yakni partisipasi warga agar lebih aktif untuk peduli lingkungan. Serta yang ketiga yakni dari segi ekonomi yaitu meningkatkan perekonomian warga dan membuka peluang kerja dan usaha. Selain itu ada pula dukungan atau keterkaitan yang diajukan dalam pengembangan batik diperlukan pembangunan IPAL (Instalansi Pengolahan Limbah) dari kegiatan membatik, perbaikan Balai RW sebagai pusat kegiatan membatik dan ruang pameran dari pengrajin Batik Semarang, serta partisipasi dari stakeholder lain seperti swasta dalam program ini.

Dalam implementasinya, pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan fisik. Jika dibandingkan dengan pengajuan masyarakat yang tertuang dalam pemaparan infografis, infrastruktur yang dibangun tidak mengcover seluruh pengajuan dari masyarakat. Persoalan lainnya adalah, dalam pengajuan yang dilakukan oleh masyarakat bahwa pembangunan infrastuktur ini dilakukan kepada seluruh Kampung Batik atau keseluruhan RW 02 Kelurahan Rejomulyo, namun pada implementasinya pembangunan infrastruktur ini hanya dibangun di RT 02 atau Kampung Batik Gedhong saja.

Ketidakmerataan pembangunan infrastruktur tersebut lantas menimbulkan konflik internal berupa keirian dalam internal masyarakat RW 02 Kelurahan Rejomulyo, salah satunya yakni warga RT 04 atau Kampung Batik Tengah. Mengutip dari Arif (2018) menjelaskan bahwa pembangunan yang dilihat hanya sebatas sesuatu yang bersifat fisik atau infrastruktur saja merupakan bentuk pemikiran yang masih sempit dalam pembangunan. Ditambah dengan persepsi pemerintah yang lebih banyak berorientasi pada pembangunan fisik daripada pembangunan kualitas manusianya. Padahal pembangunan yang paling substansial adalah membangun kualitas manusia atau suprastrukturnya (Arif, 2018).

Padahal keberhasilan kampung tematik ini didasari pada pemetaan masalah dan pengumpulan gagasan serta kreativitas yang partisipatif dari warganya (Kloczko-Gajewska, 2014).

Di internal Kampung Batik sendiri memang ada pembangunan yang berasal dari swadaya masyarakat yang sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Kloczko-Gajewska (2014). Pembangunan ini berasal dari keirian yang timbul akibat adanya ketidakmerataan pembangunan di Kampung Batik. Pemetaan masalah dalam pembangunan ini dilakukan oleh masyarakat Kampung Batik Tengah (RT

04) dengan tujuan awal untuk membangun dan membenahi kampung yang berupa perbaikan wilayah kumuh dan mengurangi kriminalitas.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kampung Tematik di Kampung Batik

Untuk melihat peran serta masyarakat dalam pembangunan, penelitian ini akan melihat tiga dimensi partisipasi pembangunan oleh Cohen dan Upghoff (1980: 8) yang membagi partisipasi dalam:

1. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat
2. Pihak-pihak yang berpartisipasi di dalamnya
3. Pelaksanaan partisipasi masyarakat

Melalui alat-alat analisis yang digunakan, maka diperoleh hasil-hasil sebagai berikut:

Bentuk partisipasi masyarakat dibagi dalam empat jenis yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam implementasi, partisipasi dalam pemerolehan manfaat, dan partisipasi dalam evaluasi. Pada partisipasi dalam

pengambilan keputusan Cohen dan Upghoff (1980) menjelaskan variabel yang dapat ditentukan untuk menilai partisipasi ini yakni penentuan ide, pembuatan pilihan yang berkaitan dengan masyarakat, perumusan pilihan atau opsi yang akan dilakukan, penilaian pilihan, perumusan rencana untuk menerapkan pilihan yang telah dipilih.

Namun berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa variabel-variabel tersebut tidak dilakukan oleh masyarakat Kampung Batik. Pihak-pihak dari masyarakat yang mengurus perencanaan pembangunan kampung tematik di Kampung Batik pun sudah sulit untuk dimintai keterangan, seperti Ketua RW yang lama yang sudah meninggal, Lurah dan Camat yang sudah ganti, sehingga informasi-informasi yang didapat hanya bisa diambil dari tokoh masyarakat yakni Eko Hariyanto yang

cenderung sudah banyak lupa mengenai awal-awal pembangunan.

Pada partisipasi dalam implementasi Dari hasil yang ditemukan di lapangan bahwa masyarakat menyalurkan sumber dayanya dalam bentuk tenaga yang dilakukan secara gotong royong dan sukarela. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Aji Muhammad Nasir selaku Ketua RT 02 bahwa masyarakat RT 02 melakukan gotong royong dan kerja bakti ketika bahan material untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka program kampung tematik datang.

Di Kampung Gedhong atau RT 02 kemandirian masyarakat dalam pembangunan kampung cenderung rendah karena masyarakat hanya berfokus pada usaha bisnisnya masing-masing. Masyarakat juga kurang terlatih dalam pelaksanaan pembangunan karena merasa tidak peduli dengan pembangunan kampung dan cenderung

individualis. Masalah dan kendala pembangunan pun tidak terselesaikan karena memang tidak dibukanya kesempatan masyarakat dalam menyalurkan informasi dan saran. Selain itu masyarakat juga merasa takut dan tidak berani komplain dengan apa yang diberikan oleh pemerintah.

Pada partisipasi dalam implementasi, secara materi dalam hal konsumsi masyarakat kurang mampu mendapatkan manfaat berupa sembako yang diberikan dari CSR seperti BRI atau BNI. Dalam pendapatan masyarakat mendapatkan manfaat berupa penghasilan dari bisnis batik seperti pengrajin batik, berjualan batik, melakukan pelatihan membatik. Selain secara individu masyarakat juga dapat mendapatkan penghasilan berupa penyewaan tempat untuk acara-acara dari kampus, pemerintah, perusahaan, instansi, dsb.

Selain membatik masyarakat juga mendapatkan penghasilan dari parkir wisatawan, berjualan makanan atau lainnya yang juga ikut meningkat karena kampungnya menjadi ramai. Dalam aset masyarakat juga mendapatkan manfaat berupa peralatan membatik yang bisa digunakan untuk memproduksi batik atau melakukan pelatihan membatik.

Keuntungan non-material yang dirasakan oleh masyarakat Kampung Batik diantaranya yakni rasa harga diri dan keberhasilan karena nama kampungnya menjadi terkenal, banyak dikunjungi pejabat-pejabat besar, kampungnya menjadi bagus, promosi kepada pengembangan bisnis, dll.

Secara garis besar, dapat kita simpulkan bahwa persoalan terbesar dari masalah yang ada di Kampung Batik adalah karena ketidakmerataan pembangunan yang dilakukan pada seluruh RT. Ketidakmerataan

pembangunan ini menimbulkan adanya keirian dari RT lain. Bagi masyarakat yang RTnya memiliki sumber daya baik kemampuan Sumber Daya Manusia berupa keahlian maupun pikiran, tenaga, keungan, materi, kemauan, dan kebersamaan maka hal ini bisa mewujudkan kampung yang mereka inginkan. Namun bagi kampung yang secara partisipasi masyarakatnya rendah dan tidak ada fokus untuk pembangunan kampung yang salah satunya difaktori karena keterbatasan dana, maka mereka cenderung biasa saja menanggapi fenomena kampungnya bahkan ada yang merasa iri dan menjadikannya sebagai kompetisi yang tidak sehat.

Bagi kedua kampung (RT) yang sudah terbangun yakni Kampung Gedhong dan Kampung Djadhoel, hal ini juga menjadikan kompetisi yang tidak sehat bagi para tokohnya. Masing-masing tokoh dari kedua RT tersebut terlihat

masih berselisih dan cenderung menjatuhkan satu sama lain. Hal ini dikarenakan rasa tidak terima salah satunya karena disebut egois dan hanya berfokus pada keuntungan diri sendiri dan tidak ada usaha membantu yang lain. Setelah ditelusuri lebih lanjut, perselisihan ini disebabkan karena adanya perbedaan pandangan dan paham dari masing-masing tokoh. Seperti pengakuan dari Eko Hariyanto, beliau merasa bahwa beliau sudah berbeda prinsip dengan masyarakat lain mengenai pengelolaan batik. Eko Hariyanto merasa hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat memiliki kemauan untuk pelestarian batik namun cenderung berfokus pada profit saja.

Bagi tokoh-tokoh di masyarakat Kampung Djadhoel mereka juga merasa bahwa partisipasi masyarakat lain di Kampung Batik cenderung rendah. Masyarakat masih memiliki

individualisme dan ketidakpedulian yang tinggi, bahkan termasuk masyarakat di dalam RTnya sendiri. Pengakuan dari tokoh-tokoh ini menyebut bahwa masyarakat masih cenderung acuh dan tidak peduli terkait kondisi kampungnya baik pada masa pembangunan maupun proses pemeliharaan hasil pembangunan. Baik dari Eko maupun tokoh-tokoh dari Kampung Djadhoel sendiri sudah mengetahui terkait komentar-komentar pihak lain mengenai diri mereka masing-masing. Namun mereka berpendapat bahwa hal ini juga sulit dilakukan jika tidak ada kemauan yang sama dari pihak lain untuk pembangunan kampungnya.

Dari sisi administratif yakni pihak Ketua RT dalam hal ini narasumber yang diambil adalah Aji Muhammad Nasir selaku Ketua RT 02 mengaku kewalahan karena ada tokoh-tokoh ini yang sulit berbaur dengan masyarakat. Meskipun berposisi sebagai Ketua RT 02, Aji

Muhammad Nasir juga turut mengomentari tokoh-tokoh yang ada di Kampung Djadhoel. Aji Muhammad Nasir mengaku bahwa dengan posisinya sebagai Ketua RT yakni jika disingkat yaitu Rukun Tetangga yang tujuannya adalah merukunkan antar tetangga di RTnya menjadi sedikit terhambat karena tokoh-tokoh ini seperti menguasai kampung dan pengaruhnya mengalahkan posisi dan kedudukan Ketua RT. Beliau bahkan menyebut bahwa tokoh-tokoh yang ada di Kampung Djadhoel sudah mengalahkan Ketua RT di sana, namun karena Ketua RT di sana baru saja meninggal dunia dan belum digantikan maka hal ini masih belum bisa penulis konfirmasi kebenarannya.

Ida Purwati selaku Ketua RW 02 Kelurahan Rejomulyo atau Kampung Batik berpendapat bahwa beliau sudah kelelahan dengan perselisihan yang ada di kampungnya. Berbeda dengan Ketua

RT 02, Ida Purwati selaku Ketua RW sendiri mengaku justru terbantu dengan adanya tokoh-tokoh tersebut, apalagi dalam mengurus kampungnya ke pihak eksternal yang banyak datang di Kampung Batik. Pihak eksternal tersebut bisa dari pemerintah, perguruan tinggi, perusahaan, dll yang datang ke kampungnya. Menanggapi komentar-komentar negatif dari masyarakat kampungnya, Ida Purwati mengaku sudah tidak peduli dan hanya mau berfokus pada mereka-mereka yang aktif dan mau membantu pembangunan kampung saja. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perselisihan masyarakat memang sudah berlangsung lama dan belum ditemukan solusi permasalahannya.

Pada partisipasi dalam evaluasi, evaluasi aktual yang berfokus pada pembangunan tidak dilakukan secara struktur oleh masyarakat namun dilakukan secara informal oleh beberapa

tokoh saja seperti saat ada kunjungan pemerintah ke Kampung Batik, melalui pihak-pihak kenalan, atau bagi beberapa masyarakat kecil kritik tersebut disampaikan hanya melalui mulut ke mulut di warung-warung kopi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pertanyaan penelitian ini yakni untuk mendapatkan gambaran terkait bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung tematik di Kampung Batik Kota Semarang maka dapat disimpulkan dalam bentuk-bentuk partisipasi seperti pada partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat di sini masih bersifat administratif dan formalitas yakni sebatas untuk memenuhi persyaratan pembangunan kampung tematik dalam hal pengajuan proposal. Sedangkan pada partisipasi dalam implementasi, partisipasi masyarakat di sini masih sebatas membantu pembangunan infrastuktur yang dilakukan

pemerintah. dalam pemerolehan manfaat, partisipasi masyarakat di sini memang cenderung tinggi tapi masih belum merata kepada seluruh masyarakat Kampung Batik. Pada partisipasi dalam evaluasi pun

masyarakat masih mengandalkan kenalan dari pihak orang dalam Pemerintah Kota saja namun kepastian akan tindak lanjutnya pun tidak pernah diketahui.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, T. (2018). *Kampung Tematik Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Permasalahan Pemukiman Kumuh di Kota Malang*. Wahana, 70 (2). 37-48.
- Babel, Y. (2022, September 8). *Tahun ini Pemkot Semarang Bakal Tambah 10 Kampung Tematik*. Retrieved from Halo Semarang: <https://halosemarang.id/tahun-ini-pemkot-semarang-bakal-tambah-10-kampung-tematik>
- Budianta, M., & Hapsarani, D. (2018). *Meniti Arus Lokal-Global: Solusi Kampung untuk Masalah Perkotaan*. Depok: Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia.
- Cahyono, M. D. (2018). Kampung Berbasis Eko-Sosio-Kultural. In M. Budianta, & H. Dhita, *Meniti Arus Loka-Global: Jejaring Budaya Kampung* (pp. 29-44). Depok: Infermia Publishing.
- Fajlin, E. Y. (2022, September 4). *Kampung Tematik di Kota Semarang Didorong Naik Kelas Jadi Desa Wisata*. Retrieved from Berita Semarang: <https://jateng.tribunnews.com/2022/09/04/kampung-tematik-di-kota-semarang-didorong-naik-kelas-jadi-destinasi-wisata>
- Lasaiba, M. A. (2022). Perkotaan dalam Prespektif Kemiskinan, Pemukiman Kumuh dan Urban Heat Island (Suatu Telaah Literatur). *GEOFORUM 1*(2), 1-11.
- Nasution, S. (1995). *Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perkotaan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Pemerintah Kota Semarang. (2016). *Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/799 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi dan Tema Kampung Tematik Kota Semarang Tahun 2016*. . Semarang.
- Syarifa, N. H., & Wijaya, A. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan melalui Program Kampung Tematik (Studi Kasus di Kampung Batik Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang). *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 8 (1), 515-531.
- Wibisono, L. (2019, Oktober 25). *Merebaknya Kampung Tematik di Kota Semarang*. Retrieved from

Halo Semarang:
<https://halosemarang.id/merebaknya-kampung-tematik-di-kota-semarang>